

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang bercorak agraris. Wilayahnya yang luas dengan dominasi iklim tropisnya disertai dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanah wilayah Indonesia menjadi subur. Berbagai tanaman mudah tumbuh sehingga banyak masyarakat berkecimpung di bidang pertanian. Pada masa awal kemerdekaan pemerintah mulai membuat berbagai kebijakan guna membentuk dan memajukan negara Indonesia. Salah satunya adalah usaha untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara swasembada beras, melihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian.

Pertanian di Bojonegoro mencakup padi, palawija, hortikultura, tebu, mina padi dan tembakau. Hasil pertanian yang mendominasi di Bojonegoro adalah padi dan tembakau. Beberapa permasalahan yang sering menyerang pertanian di Bojonegoro adalah bencana hama, banjir dan kekeringan. Daerah di Bojonegoro sendiri cenderung mengalami hal-hal yang menghambat kegiatan pertanian. Pada saat musim kemarau sebagian daerah di Bojonegoro cenderung mengalami kekeringan yang parah dan pada masa musim hujan daerahnya sering dilanda banjir.¹ Hal ini menyebabkan daerah Bojonegoro tidak jarang mengalami gagal panen. Selain itu bencana hama juga sering menyerang wilayah pertanian Bojonegoro. Kondisi ini berlangsung dengan cukup lama hingga adanya perubahan terjadi pada masa pemerintahan Indonesia setelah merdeka.

¹ Effa Pratama Putri, "Sistem Irigasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1978-1988", *Skripsi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya* 2018. hlm. 3-4.

Pada masa Orde Lama kebijakan pangan mulai digalakkan namun hasilnya belum cukup optimal. Salah satu kebijakan Orde Lama yang masih diteruskan pada masa Orde Baru adalah Bimas (Bimbingan Massal). Ditangan pemerintahan Orde Baru dengan program Bimas yang sudah mengalami penyempurnaan hasil produksi padi mengalami peningkatan.

Bimas adalah suatu program penyuluhan pertanian yang bersifat massal. Program ini mulai dikenal pada tahun 1965. Bimas sendiri pada awalnya merupakan penyempurnaan dari kebijakan pangan Kasimo (kebijakan pangan pada masa Orde Lama). Kebijakan Kasimo menggunakan pendekatan penyuluhan percontohan. Pendekatan semacam ini mengikuti sistem penyuluhan pemerintah penjajahan Belanda, dengan apa yang disebut *Olie Vlek*, yakni bertujuan menyebarkan cara-cara bertani yang lebih baik.²

Pengaplikasian program Bimas membuahkan hasil yang cukup signifikan terjadi pada masa Orde Baru. Pada awal masuk pemerintahan Orde Baru, terjadi peningkatan produksi beras meskipun peningkatannya kurang stabil disebabkan karena musim kemarau panjang dan juga partisipasi dari program Bimas belum menyeluruh ke daerah seluruh Indonesia dan juga pelaksanaannya sendiri belum sempurna. Dengan adanya peningkatan ini, Intensifikasi padi pun semakin luas areanya sehingga muncul istilah Inmas (intensifikasi massal 1968) di samping Bimas itu sendiri.³ Beberapa program cabang Bimas pun muncul yaitu program

² Anne Booth, *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1982, hlm. 31

³ Sri Wahyuni dan Suci Indraningsih. 2003. "Dinamika Program dan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi." dalam *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 21, no. 2, hlm. 147.

terkait pengintensifikan: Intensifikasi Umum dan Intensifikasi Khusus (Inmum dan Insus).

Puncak keberhasilan program Bimas terjadi pada tahun 1984 ketika Indonesia berhasil menjadi negara swasembada. Keberhasilan ini mengakibatkan program Bimas mulai digalakkan di seluruh daerah. Khususnya daerah-daerah yang berpotensi sebagai daerah pertanian seperti halnya kabupaten Bojonegoro. Perlu diketahui bahwa program Bimas yang diterapkan pada setiap daerah memiliki beberapa perbedaan. Hal ini disebabkan karena setiap daerah memiliki kendala atau masalah pertanian yang berbeda-beda. Di Bojonegoro sendiri program Bimas dan seperangkatnya mulai terorganisir dan berjalan dengan baik semenjak tahun 1978. Tahun ini bertepatan dengan berdirinya kantor resmi dinas pertanian di Bojonegoro yang pada mulanya bagian bidang pertanian tergabung dengan dinas penerangan. Para anggota badan harian Bimas sendiri diambil dari anggota dinas-dinas lainnya.⁴ Jadi anggotanya terdiri dari gabungan beberapa dinas yang ada seperti dinas perairan, dinas peternakan, dan dinas pertanian itu sendiri.

Bojonegoro adalah salah satu kota di Jawa Timur yang mayoritas penduduknya bekerja dalam sektor agraris. Daerah yang lewati oleh jalur Sungai Bengawan Solo memiliki tanah yang subur dan cocok untuk di fungsikan sebagai lahan pertanian. Beberapa daerahnya yang jauh dari aliran sungai berada di wilayah selatan. Wilayah daerah selatan ini didominasi oleh tanah kapur yang

⁴ Wawancara dengan Sriyani (Anggota Badan Harian Bimas, bagian Penyuluhan), pada tanggal 13 Agustus 2020

tidak bisa menyerap atau menyimpan air hujan dengan baik. Daerah bagian selatan didominasi oleh tanaman hutan jati. Setiap musim kemarau daerah ini sering mengalami kekeringan karena tanahnya yang tidak dapat menyimpan air dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan daerah bagian utara yang dekat dengan aliran Sungai Bengawan Solo selalu mengalami banjir ketika musim hujan datang. Dataran daerah ini juga merupakan daerah dataran kurang tinggi, hampir dalam setiap musim hujan daerah ini mengalami banjir. Bencana banjir dan kekeringan ini cukup membuat para petani mengalami gagal panen.

Semenjak memasuki masa pelita, pemerintahan kabupaten Bojonegoro telah membuat beberapa kebijakan-kebijakan pertanian. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat bertujuan mengatasi masalah-masalah pertanian serta meningkatkan produksi pertanian itu sendiri. Salah satunya seperti membangun irigasi dan waduk untuk mengatasi masalah kekeringan ketika kemarau datang. Kebijakan lainnya yaitu membentuk badan harian Bimas. Adanya program Bimas yang diadakan di Bojonegoro mengajak para petani mengenal dan mengatasi masalah-masalah pertanian. Program Bimas berupa penyuluhan mengedukasi dan mengenalkan cara mengolah pertanian dengan cara yang lebih modern yaitu dengan menggunakan pupuk. Bimas juga bertugas mengawasi jalannya pembagian pupuk-pupuk yang dibutuhkan oleh para petani. Serta mengadakan berbagai program perluasan areal sawah atau intensifikasi khusus.⁵

Setelah dibentuknya Pada tahun ini Bimas berhasil meningkatkan produksi bahan pertanian pangan. Produksi padi, jagung dan bahan pangan

⁵ *Ibid.*

lainnya meningkat dikarenakan luas lahan pertanian pada masa itu juga mengalami perluasan yang cukup signifikan. Perluasan area tanam pertanian atau sawah adalah salah satu program dinas pertanian yang masuk pada program Bimas intensifikasi. Salah satu faktor yang cukup penting dalam keberhasilan produksi dan perluasan areal pertanian adalah adanya pembangunan saluran irigasi Bengawan Solo pada tahun 1978.⁶ Saluran irigasi ini memberikan dampak yang cukup besar pada bidang pertanian

Mulai berkembang dan meluasnya areal sawah pertanian merupakan salah satu tanda dari hidup dan berhasilnya kebijakan-kebijakan pertanian yang diterapkan oleh pemerintah pada masa itu. Tentu saja program Bimas juga cukup memiliki andil dalam peran memajukan pertanian di kabupaten Bojonegoro.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah, rumusan masalah merupakan bagian yang cukup penting. Rumusan masalah digunakan sebagai batasan dalam penulisan sehingga karya ilmiah tidak keluar dari pokok pembahasan. Secara sederhana pokok permasalahan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bimas padi tahun 1978-1998 di Bojonegoro?
2. Bagaimana kendala dan dampak pelaksanaan program Bimas terhadap hasil produksi padi Bojonegoro 1978-1998

⁶ Effa Pratama Putri, *Op.cit*, hlm. 4.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah tentu saja terkandung tujuan dan manfaat. Penulis dengan sekuat tenaga dapat mencapai tujuan penulisan karya ilmiah dengan menggali beberapa sumber yang ada. Tujuan penulisan karya ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan kegiatan pelaksanaan program Bimas padi pada tahun 1978-1998 di Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk menjelaskan apa saja kendala atau hambatan dari pelaksanaan program Bimas padi pada tahun 1978-1998 di Kabupaten Bojonegoro
3. Untuk menjelaskan apa saja dampak dari pelaksanaan program Bimas padi pada tahun 1978-1998 di Bojonegoro

Selain tujuan di atas diharapkan tulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah wawasan tentang program Bimas padi tahun 1978-1998 di kabupaten Bojonegoro sehingga dapat diaplikasikan dalam menghadapi krisis pangan di masa depan
2. Menambah wawasan tentang hambatan pelaksanaan program Bimas padi 1978-1998 di kabupaten Bojonegoro
3. Menambah sumber dan wacana baru dalam penulisan sejarah khususnya dalam bidang sejarah pertanian

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam penulisan sejarah juga memerlukan batasan dan sasaran yang jelas dalam usaha untuk melukiskan masa lampau karena tuntutan zaman yang terus berubah serta memiliki masalah yang berbeda-beda. Ilmu sejarah memiliki perbedaan dengan ilmu sosial yang lain yaitu pada segi penambahan batas waktu dan ruang dalam penulisan sejarah. Batasan ini berfungsi untuk memberikan hasil yang valid dan tingkat kredibilitas yang tinggi.

Ruang lingkup pada tulisan ini bertempat di Bojonegoro. Bojonegoro menjadi pilihan dikarenakan selain dikarenakan kedekatan emosional kota ini juga masih jarang terlihat dalam pembahasan tulisan sejarah. Bojonegoro yang penulis maksud adalah seluruh wilayah yang dicakup oleh kabupaten Bojonegoro. Alasan lainnya adalah karena Bojonegoro merupakan daerah yang mayoritasnya bekerja pada sektor agraris. Bojonegoro juga merupakan salah satu kota yang mengikuti program Bimas.

Pemilihan tahun 1978-1998 sendiri dikarenakan pada tahun 1978 program bimbingan massal atau yang Bimas dalam bidang pertanian mengalami keberhasilan dalam menaikkan jumlah produksi pertanian dan juga luas area tanam pertanian. Program Bimas terus berkembang dengan mulai dibangunnya posko-posko Bimas yang difungsikan sebagai pengawas serta penyuluhan program-program yang pada saat itu diterapkan. Untuk batas tahun di batasi dengan tahun 1998 dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun berakhirnya

masa kepemimpinan presiden Soeharto atau berakhirnya masa Orde Baru. Karena dapat kita tahu program Bimas sendiri identik dengan Orde Baru.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penulis mencari referensi melalui buku dan jurnal-jurnal yang memiliki pembahasan yang hampir seirama dengan Bimas padi pada tahun 1978-1998 di Kabupaten Bojonegoro. Tinjauan pustaka yang telah ditemukan penulis adalah sebagai berikut :

Tinjauan Pustaka pertama penulis ambil dari buku karya Anne Booth dan Peter Mc Cawley yang berjudul “Ekonomi Orde Baru”.⁷ Buku ini berisikan tentang kegiatan pemerintah pada masa Orde Baru. Pembahasan yang menjadi tinjauan penulisan karya ini adalah bagian yang membahas tentang kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Buku ini membahas tentang kebijakan pangan, kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya. Kebijakan pangan yang dibahas pada buku ini bukan hanya kebijakan Bimas saja. Buku ini juga membahas tentang BULOG yang merupakan salah satu program andalan tentang pangan pemerintahan Orde Baru. Selain membahas berbagai kebijakan yang ada di masa pemerintahan Orde Baru buku ini juga membahas tentang masalah pertumbuhan penduduk, perkembangan angkatan kerja dan perekonomian.

Buku kedua yang menjadi tinjauan pustaka penulis adalah buku karya Leon A. Mears yang berjudul “Era Baru Ekonomi Pemberasan”.⁸ Dalam buku ini

⁷ Anne Both dan Peter Mc Cawley, (*Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LPJ3ES, 1990)

⁸ Leon A. Mears, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982)

juga menjelaskan tentang kebijakan pangan. Namun pembahasan buku ini lebih fokus membahas ekonomi pemberasan, berupa produksi dan impor beras, karakteristik konsumsi beras, organisasinya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan ekonomi beras. Buku ini juga memberikan saran terhadap kebijakan pangan untuk tahun 1980-an. Beberapa pembahasan yang dibahas pada bab kebijakan pangan lebih fokus pada organisasi BULOG dan tentang kebijakan harga beras pada masa Soeharto.

Buku “Pangan dalam Orde Baru” juga menjadi tinjauan pustaka penulis karena dalam buku ini membahas tentang permasalahan dan juga kendala dalam produksi pangan pada masa Orde Baru. Pembahasan ini dapat menjadi tinjauan guna membantu pembahasan penulis tentang hambatan dan kendala kebijakan Bimas pada masa Orde Baru. Buku ini juga membahas tentang kebijakan harga dan krisis pangan pada masa Orde Baru. Pembahasan lainnya mengenai pangan sebagai komoditi dagang dan juga tentang perdagangan pangan di dunia. Kebijakan pangan yang dibahas pada buku ini juga lebih memfokuskan pada bahasan BULOG.

Tinjauan pustaka selanjutnya diambil dari buku yang berjudul “Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan”.⁹ Buku ini membahas tentang organisasi petani dalam pembangunan pedesaan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Selain membahas organisasi petani di Indonesia, buku ini juga sedikit mengulas organisasi petani di negara

⁹ Budi Winamo, *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003)

berkembang lainnya, seperti Taiwan, Thailand dan Filipina. Dijelaskan dalam buku ini Indonesia dan negara berkembang yang sudah disebutkan memiliki permasalahan yang sama. Masalah yang dimaksud adalah penyelewengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa oleh tuan tanah dan elit-elit desa.

Buku ini juga membahas kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan khususnya masyarakat desa petani dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para petani. Kebijakan yang bertujuan untuk membangun pedesaan yang dibahas dalam buku ini salah satunya adalah kebijakan intensifikasi padi, Bimas dan inmas. Dalam penerapan kebijakan tersebut, terdapat berbagai permasalahan. Meskipun produksi padi meningkat, namun peningkatan yang dihasilkan masuk dalam kategori peningkatan yang sangat lambat. Hal ini disebabkan karena lemahnya Bimas karena kredit dalam negeri dan minimnya pupuk yang tersedia.

Buku “Bojonegoro 308 Tahun “20 Oktober 1677- 20 Oktober 1985”¹⁰ yang berisi tentang sejarah terbentuknya kota Bojonegoro. Bojonegoro yang dulunya mengalami beberapa kali pergantian nama dari Matahun, Jipang, Rajakwesi hingga menjadi Bojonegoro. Buku ini juga berisikan keadaan Bojonegoro pada masa itu tentang pencapaian-pencapaian yang telah diraih dan lain-lain.

Penulis juga mengambil tinjauan pustaka dari beberapa jurnal. Salah satunya jurnal karya Lailatul Muamaroh yang berjudul “Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (Bimas) Padi di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998”.

¹⁰ Panitia peringatan hari jadi Bojonegoro, *Bojonegoro 308 Tahun “20 Oktober 1677- 20 Oktober 1985”*, (Bojonegoro : Pemkab Bojonegoro, 1985)

Pada dasarnya penulis memang terinspirasi dari hasil karya ini. Akan tetap pembahasan kedua penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda baik dari segi tempat maupun tahun yang diterapkan. Untuk sistematika penulisan mungkin hampir sama akan tetapi dalam pembahasan atau isi akan berbeda. Karena setiap daerah memiliki kendala yang berbeda dalam pelaksanaan program Bimas oleh sebab itu program Bimas juga perlu mengikuti daerah yang menjadi target programnya. Contohnya saja Bojonegoro memiliki masalah sering gagal panen dikarenakan ketika musim hujan daerahnya sering terendam banjir. Jurnal ini pembahasannya juga diawali pada tahun 1984 setelah Indonesia menjadi negara swasembada beras.

Tinjauan pustaka selanjutnya berasal dari karya ilmiah skripsi mahasiswa ilmu sejarah Universitas Airlangga. Skripsi ini berjudul “Aktivitas Petani Tembakau di Bojonegoro Tahun 1970-1990.”¹¹ Skripsi karya Yuli Purnamaningtyas ini membahas tentang pertanian dan kehidupan petani di Bojonegoro khususnya petani yang memproduksi tanaman tembakau. Dituliskan pada karya ini Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang memiliki produksi tembakau terbaik khususnya tembakau virginia. Penulis juga menulis kehidupan petani tembakau di Bojonegoro dari segi ekonomi, sosial dan juga pendidikan.

¹¹ Yulia Purnama Ningtyas, “Aktivitas Petani Tembakau di Bojonegoro Tahun 1970-1990”, *Skripsi*, (Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya 2016)

1.6 Kerangka Konseptual

Sejarah merupakan ilmu yang menceritakan kejadian atau peristiwa pada masa lampau. Penulisan karya ilmiah ilmu sejarah pada hakikatnya memiliki cara yang berbeda-beda. Beberapa ada yang mencantumkan kerangka konseptual pada karya tulisnya. Kerangka konseptual merupakan uraian dari konsep-konsep masalah atau tema yang diteliti. Penggunaan judul “Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (BIMAS) Padi : Kendala dan Dampaknya di Bojonegoro Tahun 1978-1998” memiliki kerangka konseptual yang menjelaskan tentang pelaksanaan salah satu kebijakan pertanian atau pangan pada masa pemerintahan presiden Soeharto.

Konsep pelaksanaan penulis ambil dari pengertian pelaksanaan menurut Bowne dan Wildavsky yang mengemukakan pelaksanaan merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dalam hal ini pelaksanaan merupakan sebuah kegiatan yang terencana dan diterapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pelaksanaan program Bimas sendiri merupakan perluasan dan penerapan aktivitas program Bimas untuk merasakan manfaat dari program Bimas tersebut.

Program Bimas merupakan salah satu program kebijakan pangan. Dalam hal ini penulis mengambil definisi kebijakan menurut Edi Suharto (2008:7). Ia menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pangan memiliki definisi suatu prinsip yang direncanakan untuk kepentingan pangan. Dari pengertian yang tertera menjelaskan bahwa kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah. Kebijakan

pangan sendiri dibuat guna memecahkan permasalahan kebutuhan pangan. Indonesia pada masa itu Orde Baru pengolahan pemenuhan kebutuhan pangannya masih belum stabil. Oleh sebab itu muncullah program Bimas yang bertujuan menaikkan produksi pangan (beras).

Program, menurut para ahli diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones : 1994).

Bimas yang dimaksud oleh penulis adalah program intensifikasi yang berfokus pada peningkatan produksi pertanian khususnya padi. Bimas intensifikasi pertanian adalah program peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui pemasyarakatan teknologi baru yang efektif dan efisien pada sistem usaha tani terpadu dengan komoditas dasarnya salah satunya adalah padi, yang didukung dengan fasilitas kredit usaha tani (KUT).¹² Di Bojonegoro sendiri program Bimas terbagi menjadi beberapa macam. Program-program tersebut seperti Inmas, Inmum dan Insus dan Supra Insus. Bojonegoro cenderung aktif dalam program Bimas Supra Insus.

1.7 Metode Penelitian

¹² Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II. Bojonegoro no. 22A tahun 1997 tentang program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kab. Bojonegoro th. 1997/1998. Dari satuan pelaksana Bimas Bojonegoro. (bab 1, pasal 1, poin b, e, f.)

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan beberapa metode penulisan sejarah sebagai berikut :

1. Heuristik, yaitu tahap pengumpulan sumber dan data yang diperlukan dalam penulisan. Penulis mengumpulkan beberapa sumber primer dan juga sumber sekunder. Penggunaan sumber primer yang dilakukan oleh penulis berupa arsip dan wawancara kepada narasumber pendukung tema penulisan. Sumber primer penulis didapatkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang terletak di jalan Jagir Wonokromo no. 350, berupa keputusan bupati tentang pedoman program Bimas intensifikasi pertanian di Bojonegoro. Sumber primer lainnya berupa kumpulan hasil pertanian dari dinas pertanian provinsi Jawa Timur pada tahun terkait. Kemudian untuk wawancara, penulis melakukan wawancara terhadap salah satu anggota badan harian Bimas Bojonegoro pada tahun terkait yang sampai saat ini masih bekerja di dinas pertanian Bojonegoro. Peneliti juga melakukan pencarian sumber sekunder di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Jawa Timur dan menemukan beberapa koran-koran lama yang disusun menjadi kliping. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dari pihak pelaksana Bimas dan juga dari pihak petani. Sumber-sumber sekunder yang didapat berupa buku-buku, jurnal dan beberapa website resmi atau berita. Sumber sekunder lainnya juga didapatkan dari skripsi-skripsi khususnya yang membahas pada bidang dan tempat yang sama yaitu pada bidang pertanian dan juga berada di kabupaten Bojonegoro.

Beberapa penyedia sumber buku-buku terkait penelitian merupakan perpustakaan milik kampus sendiri yang memiliki koleksi buku cukup lengkap dan membantu dalam penulisan.

2. Kritik sumber, tahap mengkritisi sumber yang telah didapat. Pengecekan kebenaran sumber. Beberapa sumber yang telah didapat dipahami dan di cocokkan antara sumber satu dengan yang lainnya untuk meminimalkan kesalahan bahan sumber.
3. Interpretasi adalah tahap penafsiran sumber-sumber yang telah diseleksi. Kegiatan memahami sumber dan mencerna sumber guna membantu kelancaran dalam penulisan. Dalam hal ini bukan hanya berlaku pada sumber yang menggunakan bahasa asing. Sumber yang berkaitan dengan tema penulis memang bukan dari bahasa asing akan tetapi sebuah sumber tidak bisa ditelan mentah-mentah. Perlu pemahaman kemudian ditafsirkan berdasarkan gaya tulisan penulis.
4. Historiografi, tahap penyusunan tulisan sejarah setelah melakukan beberapa tahap di atas. Setelah sumber sudah dikumpulkan, di cek dan dipahami, penulisan sebuah karya tulis pun dapat dilakukan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini memiliki sistematika penulisan yang meliputi beberapa bagian di antaranya:

Bab 1 adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang

mengandung alasan mengapa penulis memilih masalah yang dibahas, kemudian dirumuskan menjadi pertanyaan di rumusan masalah.

Bab II berisi mengenai gambaran umum keadaan kabupaten Bojonegoro pada tahun terkait. Bab II memiliki sub bab yang membahas tentang geografi, demografi, dan juga keadaan sebelum adanya program Bimas diterapkan di Bojonegoro. Bahasan selanjutnya berisikan tentang latar belakang terbentuknya program Bimas secara umum lalu mengerucut ke pembahasan khusus Latar belakang Program Bimas di Bojonegoro.

Latar belakang program Bimas yang tidak lain merupakan hasil dari penyempurnaan program-program pertanian pada masa sebelumnya. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang program-program cabang Bimas yang mulai muncul pada tahun 1970an. Program-program tersebut antara lain adalah Intensifikasi Massal (Inmas), Intensifikasi Umum (Inmum), dan Intensifikasi Khusus). Latar belakang munculnya program-program ini tidak lain disebabkan oleh keberhasilan penerapan teknologi baru melalui Bimas yang telah berhasil mendobrak gejala *levelling off* (1979).

Bab III membahas tentang bahasan inti, yaitu tentang pelaksanaan program Bimas di Bojonegoro apa saja kegiatannya. Program Bimas di Bojonegoro sendiri lebih cenderung memodernisasikan cara pengolahan pertanian tradisional. Yaitu memberikan penyuluhan terhadap para petani bagaimana cara pengolahan padi yang baik dan modern juga cara-cara penggunaan pupuk yang

baik dan benar. Program ini bekerja sama dengan koperasi unit desa yang tersebar di berbagai desa di Bojonegoro.

Pembahasan dalam bab III selanjutnya membahas tentang hambatan dan kendala pelaksanaan Bimas di Bojonegoro. Kendala yang dirasa pada awal-awal pelaksanaan Bimas di Bojonegoro adalah sumber daya manusianya yang belum siap untuk menerima hal-hal yang baru dan modern. Beberapa petani juga enggan untuk berpartisipasi. Program Bimas yang menganjurkan para petani untuk menggunakan pupuk kimia cenderung dicurigai dan ditolak. Namun seiring berjalannya waktu, para petani dapat menerima program tersebut dengan bantuan kredit dan sering dilakukannya penyuluhan-penyuluhan. Selain itu kondisi ekonomi penduduk desa yang rendah juga mengakibatkan para petani tidak dapat mengupgrade dan membeli produk pertanian yang lebih modern. Untuk mengatasi hal ini pemerintah memberikan kredit kepada para petani. Akan tetapi adanya kredit ini juga memunculkan masalah baru seperti penunggakan pembayaran kredit atau hutang. Masalah lainnya juga muncul karena ulah pemerintah sendiri. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti jalani, beberapa narasumber mengatakan bahwa beberapa anggota yang memegang urusan keuangan pada masa itu juga banyak melakukan korupsi. Seperti halnya menggunakan uang angsuran untuk keperluan pribadi.

Bab IV berisikan pembahasan tentang hasil, kendala, dan dampak terhadap pelaksanaan program Bimas di Bojonegoro. Dalam bab ini dibahas tentang hasil dari pelaksanaan program Bimas yang difokuskan pada bahan pangan padi di Kabupaten Bojonegoro. Hasil pelaksanaan program Bimas padi kemudian berupa

data-data hasil panen selama tahun pelaksanaan Bimas padi yakni pada tahun 1978 hingga 1998. Pada bab ini juga dibahas tentang kendala dan dampak pada program Bimas. Kendala tersebut kemudian dijelaskan berupa beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, dan faktor lainnya. Sama seperti kendala tersebut, penjelasan pada dampak dari program Bimas juga terkait membahas dampak Bimas terhadap kehidupan para petani di Bojonegoro seperti ekonomi dan pendidikan pertanian bagi para petani di Bojonegoro.

Kemudian pada bab V berisikan penarikan kesimpulan dari seluruh bab yang telah dibahas dalam penelitian. Dan setidaknya berisikan saran-saran terhadap beberapa pihak terkait tema yang diteliti.